

# PELESTARIAN KEKUASAN PADA MASA MATARAM ISLAM: SEBHA JAMINAN LOYALITAS DAERAH TERHADAP PUSAT<sup>1</sup>

Ari Sapto

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang

**Abstrak.** Masa lalu mengandung perubahan dan keberlanjutan. Seringkali kesinambungan realitas masa lalu mengalami perbedaan tampilan, namun substansinya tetap. Penguasa Mataram Islam memiliki mekanisme untuk menjamin loyalitas penguasa-penguasa di daerah yang menjadi yuridiksinya. Jaminan loyalitas ini penting mengingat konsep kekuasaan yang dianut dan luas wilayah kerajaan. Setelah berhasil menyatukan hampir seluruh dan beberapa wilayah di luar Jawa, Mataram mulai menata pemerintahan dan kewilayahannya. Penataan itu menghasilkan struktur pemerintahan dan kewilayahannya yang pengaruhnya dapat dilihat hingga masa sekarang.

**Kata-kata kunci:** sebha, jaminan loyalitas, kekuasaan

*Abstract. Learning from the past would be depicted the change and the continuity. The continuity of the past reality has the different form, however the substance continues till today. The Sultans of Mataram have a mechanism to guarantee the loyalty of remote areas. The guarantee of loyalty is important concept which is used in the remote areas. After succeeding to unite almost all Java Island and some areas outside of Java Island, Mataram started to organize the government and the areas. This arrangement produced the governmental structure and the structure of areas. Today, the influence could be seen clearly.*

**Keywords:** sebha, guarantee of loyalty, power

Tatkala suatu negara tumbuh dalam tingkatnya yang pertama, seperti Mataram Islam pada awal perkembangannya, tenaga birokrasi yang diambil dan digunakan oleh raja untuk mencapai kekuasaannya berasal dari keluarga raja yang dekat, pengikut, rakyat maupun sekutunya. Solidaritas sosial, hubungan pribadi dan kesetiaan merekalah yang membantu raja menegakkan pemerintahan. Setelah Mataram menjadi besar, raja-rajanya berhasil memperluas wilayah serta memonopoli kekuasaan. Akibatnya, sanak keluarga dan rakyatnya sendiri tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan tenaga birokrasi. Raja lantas mengambil tenaga lain, misalnya penguasa yang ditaklukkan dan sekutu.

Apa yang menjadi jaminan bahwa para penguasa daerah akan taat kepada raja? Dalam hal ini raja kepada para penguasa daerah menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) diharuskan menghadap atau *sheba* sebagai tanda pengakuan terhadap kekuasaan raja yang

mengundang pada waktu yang telah ditentukan; (2) menetap di ibu kota kerajaan, kemudian Raja mengawinkannya dengan salah seorang puteri anggota kerajaan (dalam hal ini para penguasa lokal dalam waktu-waktu tertentu diperkenankan berada di daerahnya masing-masing); (3) seringkali raja "menyandera" putera penguasa daerah dengan menjadikannya pegawai istana; (4) mengangkat atau menempatkan penguasa yang dicurigai untuk menduduki jabatan penting dengan tugas dan fungsi tidak jelas; (5) membatasi masa jabatan posisi tertentu dalam masa singkat; (6) memisahkan penguasa atau pejabat yang dicurigai dari basis pendukung atau daerah kekuasaannya, dan (7) menciptakan persaingan serta situasi saling curiga di antara penguasa bawahan dan para pejabatnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 230-232). Cara-cara ini sekaligus sebagai sebuah sarana bagaimana pemerintah pusat mengadakan pengawasan terhadap daerah-daerah.

Dalam ilmu politik dikenal pendekatan tradisional yang salah satu aspeknya adalah mengungkap peran nilai-nilai dan norma-norma dalam realitas politik. (Budiharjo, 1983:6). Meskipun mendapat tantangan dari beberapa pendekatan yang muncul lebih kemudian, tetapi pendekatan tradisional tetap memainkan peranan penting. Salah satunya memberi jawaban adanya keterkaitan antara nilai-nilai budaya dengan perilaku politik. Sebagai contoh Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 1998 berpidato di hadapan ribuan massa di alun-alun Yogyakarta. Momen ini juga dipandang sebagai *sebha* dan masyarakat menamainya dengan *pisowangan ageng*. Sebagai pemimpin politik DIY momen ini sangat penting dan sabdanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat berkaitan dengan adanya perubahan politik pada reformasi yang sedang bergulir.

Tulisan ini menyoroti sebagian kecil saja dari implementasi konsep kekuasaan yang ada dalam budaya Jawa. Dalam pandangan yang bersumber pada budaya Jawa, menghimpun dan melestarikan kekuasaan lebih penting daripada menggunakannya (Anderson, 2000:50). Dalam konteks inilah tulisan ini mencoba mencari jawab atas masalah bagaimana *sebha* memberikan kontribusi terhadap pelestarian kekuasaan bagi raja-raja Jawa.

## LOYALITAS DALAM KEMANUNGGALAN

Benedict Anderson melukiskan tata pemerintahan Jawa sebagai “*is that of a cone of light cast downwards by a reflector lamp*” (adalah suatu kerucut cahaya yang disorotkan ke bawah oleh lampu dengan pemantul) (Anderson, 1972:22). Ungkapan ini menggambarkan kekuatan pusat yang kuat karena didukung kuasa dan kewenangan yang tunggal. Semakin dekat pancaran sinar semakin kuat, sebaliknya semakin jauh berangsur-angsur semakin buram. Ini kiasan bagi hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini membantu memahami konsep sentralistik pemerintahan dan model negara kesatuan Jawa.

Kekuatan besar yang dimiliki pusat diharapkan dapat merangkul dan menjembatani keberagaman.

Pandangan politik Jawa melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang homogen, konstan, dan tidak mempertanyakan keabsahan (Anderson, 2000: 47-48). Perwujudan pandangan ini tampak dalam keberadaan nilai manunggal. Sumber nilai *manunggal* dapat dikembalikan pada kepercayaan Jawa, *manunggaling kawulo-gusti* atau *jumbuhing kawula-gusti* (bersatunya Tuhan dan hamba) (Moerton, 1985:18). Dalam konteks sosial menggambarkan hubungan yang ideal antara penguasa dan yang dikuasai. Tidak saja menunjukkan hubungan yang tinggi dengan yang rendah, tetapi perwujudan hubungan yang saling bergantung (Moerton, 1985:26). Tidak ada penguasa tanpa yang dikuasai, tidak ada rakyat tanpa penguasa.

*Manunggal* adalah sebuah kekuatan, sementara pertikaian dianggap suatu kelemahan yang dapat menghasilkan kehancuran. Prinsip *manunggal*, bagi Benedict Anderson, membantu untuk menjelaskan tentang “bagaimana nasionalisme mengekspresikan dorongan mendasar untuk solidaritas dan kesatuan”. Tema *manunggal* juga masih bisa dijumpai dalam sejarah Indonesia modern misalnya dalam Sumpah Pemuda, pidato-pidato Sukarno, dan pidato pembelaan Sudisman di hadapan Mahkamah Militer. *Manunggal* juga menjadi prinsip dalam implementasi Dwifungsi ABRI, seperti tampak dalam semboyan “*manunggalnya ABRI dengan rakyat*” (Anderson, 1972: 22-23). Hal ini menunjukkan kuatnya konsep kekuasaan Jawa dalam sejarah politik Indonesia.

Tata norma Jawa didominasi pengertian tentang kesetiaan, kepatuhan, pengabdian dan pengorbanan diri (van Miert, 2003:8). Nilai-nilai seperti ini tidak muncul tiba-tiba, merupakan kesinambungan dari konsepsi kekuasaan yang proses kelahirannya dapat dilacak sebelum Kerajaan Mataram terbentuk. Kesinambungan dapat terwujud karena faktor kekuatan budaya dan politik. Penguasa-penguasa tradisional Jawa membutuhkan untuk kepentingan pelestarian kekuasaan.

Nilai kesetiaan, kepatuhan, pengabdian, dan pengorbanan diri dengan mudah ditemukan serta dipancarkan dalam cerita wayang. Tema peperangan dalam wayang berkait erat dengan jiwa ksatria. Keberhasilan seorang ksatria menjalankan perannya tergantung kepada “kesanggupannya menguasai batinnya, menjauhkan diri dari pamrih, mengalahkan nafsu, dan hasrat yang tidak pada tempatnya”. Oleh karenanya lakon wayang *Sumantri Ngender* sangat disukai dan berperan sebagai teladan bagi etos kerja (Kartodirjo, Sadewo, dan Hatmosuprobo, 1987:132). Lakon ini pula yang dipilih Ngoro Siten, seorang tokoh dalam novel *Para Priyayi*, ketika diminta memilihkan lakon dalam pertunjukan wayang untuk merayakan kelulusan Lantip dari sekolah guru (Kayam, 1992).

Etika ksatria tetap dapat bertahan terutama diwariskan melalui kesusastraan dan pertunjukan wayang. Karya sastra yang sarat dengan *piwulang* merupakan bahan didaktik dan moralistik. Acapkali *piwulang* menggunakan contoh-contoh dalam cerita wayang. Pertunjukan wayang tentu saja mempunyai jangkauan peminat lebih luas daripada karya sastra.

Mangkunegoro IV (1853-1881) menghidupkan jiwa ksatria melalui *piwulang*, dalam karyanya *Serat Tripama*. Menggunakan tiga tokoh wayang untuk menggambarkan kepahlawanan yang perlu diteladani (Purwadi, 2004: 10-15). Ketiganya, masing-masing Suwanda, Kumbakarna, dan Suryaputra (Karna), menemui nasib yang sama: gugur dalam peperangan memenuhi kewajibannya terhadap negara sebagai ksatria. Khususnya mengenai Kumbakarna bagi masyarakat Jawa dianggap sebagai lambang kesetiaan. Dijadikan teladan dalam melakukan pengabdian pada cita-cita, negara, bangsa, dan pemimpin. Kesetiaan Kumbakarna lebih dihargai daripada adiknya, Wibisana yang tampan, tapi dianggap sebagai pengkhianat. Wibisana membela Rama, pihak yang benar (Margana, 2004: 234-237).

Dalam pandangan politik Jawa, seorang pemimpin harus seperti ksatria dalam lakon wayang: kuat dan siap tempur, berani tetapi tidak

sombong, jujur dan sungguh-sungguh, siap berkorban dan tidak serakah, selalu setia pada pemimpin. Nilai-nilai yang berlaku pada diri seorang ksatria berdimensi luas. Sebagai perbandingan, dalam cerita Bhagawat Gita dinyatakan bahwa seorang ksatria harus memiliki jiwa kepahlawanan, tekad diri, keteguhan, banyak akal, keberanian tempur, kedermawangan dan ketrampilan kepemimpinan (Peter Brinton, 1996: 17, Zoetmulder, 1983: 325). Hal ini menjadi acuan dan etika penguasa, baik pusat maupun daerah, dalam menjalankan perannya. Dalam perkembangannya, bahkan menjadi acuan perilaku para priyayi.

Penurunan kekuasaan dan gengsi penguasa daerah, seiring terjadinya disintegrasi kerajaan Mataram dan menguatnya kekuasaan kolonial Belanda. Untuk menerangkan turunnya gengsi para penguasa daerah ini ada tiga hal yang dapat dipakai sebagai penjelasan.

Pertama, masalah tersebut dihubungkan dengan banyaknya tindakan yang dilakukan sejak kira-kira tahun 1850 untuk memperbaiki keadaan masyarakat Jawa sesuai dengan norma Barat. Kedua, pendidikan putera bupati dan pembesar yang lain kurang diberi perhatian. Akhirnya, gengsi pembesar mungkin menurun oleh karena tingkah laku residen terhadap bupati yang seringkali tidak sesuai dengan sopan santun (Alfian, dkk, 1987:195)

B.J.O. Schrieke (1974) berpendapat lain, kemerosotan kekuasaan elite Jawa disebabkan pemerintah kolonial bertolak dari pikiran bahwa Hindia Belanda merupakan daerah penghasil yang harus memberi kepada Nederland keuntungan-keuntungan material. Untuk keperluan itu, di satu sisi ketaatan para pemimpin rakyat harus dipelihara, di sisi lain demi keamanan pemerintah kolonial, hubungan pemimpin dengan rakyatnya dikurangi. Upaya-upaya untuk mengurangi kekuasaan elite bumi-putera, terutama bupati, secara tegas dilakukan oleh Daendels, Raffles, dan dilanjutkan oleh pa-

ra Gubernur Jenderal (Schrieke, 1974, Palmier, 1960, Sutherland, 1983).

## PEMBAGIAN WILAYAH KERAJAAN MATARAM

Pada tahun 1640, hampir seluruh Jawa (kecuali Batavia dan Banten) berhasil ditempatkan di bawah kekuasaan Mataram (de Graaf, 1987: 211-228, 272-281). Untuk menciptakan stabilitas kerajaan, Sultan Agung memanfaatkan momentum penerimaan gelar dan keberhasilan pengintegrasian kerajaan, untuk menambah wibawa dan karismanya dengan mengikat kesetiaan para penguasa bawahannya di Sidang Raya *Garebeg Maulud* tahun 1641. Dalam kesempatan tersebut, diumumkan pula struktur pemerintahan Mataram, wilayah bawahan masing-masing dengan pejabatnya, dan jumlah upeti yang harus diserahkan berdasarkan registrasi yang dilakukan pada tahun 1636. Pada momentum ini, jaminan loyalitas seperti yang ditunjukkan dengan kehadiran penguasa-penguasa daerah, mengokohkan kekuasaan raja terhadap para penguasa bawahan.

Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung mencapai puncak kebesarannya. Struktur kewilayahan Kerajaan Mataram menganut pola konsentris. Berdasarkan sudut pandang konsentris yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Mataram, wilayah dibedakan dalam beberapa golongan sebagai berikut. (1) Kutagara atau kutanegara, negara. Istana raja sebagai titik pusat. Dapat dikatakan istana merupakan pusat, sedangkan kutagara adalah lingkaran wilayah yang pertama. Daerah inti ini merupakan tempat tinggal Raja dan keluarganya. (2) Bumi *Narawita* (*nara*-manusia, *suwita*-mengabdikan, tempat para hamba raja), ibukota sebagai tempat tinggal para bangsawan kerajaan. (3) *Nagaragung* atau Negara Agung (daerah inti), daerah di luar Bumi *Narawita*/Ibu kota. Di daerah ini terdapat tanah *lungguh* (jabatan) dari para bangsawan yang bertempat tinggal di Bumi *Narawita*. (4)

Mancanegara, yaitu daerah di luar *nagaragung* yang meliputi : (a) Mancanegara *Wetan* : mulai Ponorogo ke timur, (b) Mancanegara *Kulon* : mulai Purworejo ke barat. (5) Pesisiran, wilayah yang terletak di sepanjang pantai Utara, meliputi (a) Pesisiran *Kulon* : Demak ke barat, (b) Pesisiran *Wetan* : Demak ke timur (Tim Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur, 2005:52).

Kedua wilayah, Mancanegara *Wetan* dan Pesisir *Wetan*, biasanya disebut sebagai *Bang Wetan*. Demikian pula untuk *Mancanegara Kulon* dan *Pesisiran Kulon* disebut sebagai *Bang Kulon*. Struktur wilayah Mataram lengkap dengan nama-nama kabupaten dan jumlah *cacah*-nya disebutkan di dalam *Serat Pustaka Rajapuwara*. Di samping beberapa wilayah di atas, perlu ditambahkan tanah seberang (*tanah sabrang*: tanah yang berada di seberang laut), seperti Jambi dan Sukadana.

Struktur pemerintahan Mataram dari puncak berturut-turut ke bawah pada dasarnya merupakan kelanjutan dari masa Majapahit. Pada puncak kekuasaan terdapat raja yang dibantu birokrat istana. Di bawah raja terdapat penguasa-penguasa daerah yang disebut bupati. Cara-cara pengerahan tenaga birokrasi antara lain ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) pengangkatan dilakukan berdasarkan keturunan dan kesetiaan terhadap raja, (2) jabatan birokrasi di pusat kerajaan ditiru oleh penguasa daerah, (3) jabatan birokrasi tergantung pada wewenang atau sifat pribadi raja, (4) pengelolaan politik dan pemerintahan sebagai urusan pribadi raja, (5) tradisi menjadi aturan. (6) wewenang serta tugas para pejabat sering kurang jelas (tidak ada diferensiasi dan spesialisasi) (Tim Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur, 2005:55).

Dalam administrasi pemerintahan masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang pejabat tinggi. Para bupati *mancanegara* dan *pasisiran* di bawah pengawasan seorang Wedana Bupati. Dengan demikian terdapat seorang Wedana Bupati *pesisiran* dan seorang wedana bupati *mancanegara*. Wedana bupati *pesisiran wetan*

berkedudukan di Jepara. Wedana bupati *mancanegara wetan* berkedudukan di Ponorogo. Wedana Bupati, baik di *mancanegara* maupun *pesisiran*, bertugas mengawasi dan mengkoordinasi bupati-bupati kepala daerah yang ada di bawah yuridiksinya. Selanjutnya, secara hirarkhis wedana bupati berhubungan langsung dengan patih kerajaan yang mengurus bidang pemerintahan (Tim Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur, 2005:55).

Kabupaten yang terletak di *mancanegara* dan *pesisiran* diperintah oleh bangsawan setempat. Kabupaten merupakan daerah otonom dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Otonomi yang dimiliki oleh seorang bupati disertai dengan hak untuk memiliki angkatan bersenjata sendiri (Ras, 1987: 136, 324). Tugas pokok seorang bupati memungut pajak yang dibayarkan setiap tahun, mengerahkan tenaga untuk perang, mengerjakan proyek pekerjaan umum (seperti jalan dan saluran), serta menyelenggarakan peradilan di tingkat bawah (Moertono, 1985:120).

## SEBHA SEBAGAI JAMINAN LOYALITAS

Raja-raja Mataram memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan yang demikian besar diungkapkan sebagai *gung binathara, bau dhendha nyakrawati* (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia) (Moertono, 1985: 61-62). Raja dapat berbuat apa saja dan dengan cara bagaimana saja terhadap apa yang ada dalam kerajaannya. Kekuasaan yang besar dapat dilihat pada saat diadakan *sebha* (*pasebhan*). Banyaknya punggawa yang hadir dapat dijadikan ukuran besarnya kekuasaan raja (Moedjanto, 1994: 79). Masih terdapat tanda-tanda lain kebesaran kekuasaan raja Jawa, seperti banyaknya jumlah tentara, raja lain yang takluk tanpa harus mengadakan perang, dan kesediaan punggawanya dalam melakukan tugas. Lebih lanjut, G. Moedjanto secara lebih rinci menjelaskan tanda-tanda kebesaran kekuasaan raja Jawa sebagai berikut:

luas wilayah kerajaannya; (2) luasnya daerah atau kerajaan taklukan dan berbagai barang persembahan yang disampaikan oleh para raja taklukan; (3) kesetiaan para bupati dan punggawa lainnya dalam menunaikan tugas kerajaan dan kehadiran mereka dalam *pasebhan* yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu; (4) kebesaran dan kemeriahan upacara kerajaan dan banyaknya pusaka serta perlengkapan upacara yang nampak dalam upacara itu; (5) besarnya tentara dengan segala jenis dan perlengkapannya; (6) kekayaan, gelar-gelar yang disandang dan kemashurannya; (7) seluruh kekuasaan menjadi satu di tangannya, tanpa ada yang menyamai dan menandingi (Moedjanto, 1994: 70-80).

Kekuasaan raja yang besar harus diimbangi dengan kewajiban yang besar pula. Raja Jawa harus *berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta* (berbudi luhur, adil dan penuh kasih terhadap sesama makhluk). Dengan demikian raja yang baik adalah "raja yang menjalankan kekuasaannya dalam keseimbangan antara kewenangannya yang besar dengan kewajibannya yang besar pula" (Moedjanto, 1994: 78). Kemampuan menjalankan keseimbangan kewajiban ini menjadi ukuran raja yang ideal. Dalam konteks yang lebih luas, juga dapat dipakai sebagai kriteria seorang pemimpin yang baik.

Dalam hubungannya dengan kesetiaan yang dituntut oleh raja, maka kewajiban bawahan yang penting adalah *sheba*. Pada masa Mataram, *sheba* dibedakan mingguan dan tahunan. Untuk kepentingan *sheba* mingguan penguasa daerah dapat menugaskan wakilnya yang tinggal di ibukota kerajaan. Dengan demikian kewajiban hadir penguasa daerah hanya setahun sekali dan atau di saat lain di mana raja membutuhkan kehadiran penguasa daerah. Institusi *sheba* tahunan yang pada zaman Majapahit dilakukan pada bulan *Phalguna-Caitra* (Februari-Maret) dan *Crawana-Badra*

(Agustus-September) terus digunakan pada zaman Islam. Pada masa Mataram. *Sebha* disesuaikan dengan tradisi Islam, yaitu perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad, tanggal 12 Maulud tiap-tiap tahun. Perayaan tersebut kemudian menjadi tradisi resmi kerajaan: *Garebeg Maulud*.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung *sebha* tahun 1636 memiliki arti khusus, sebab pada momen ini dilakukan inventarisasi dan perhitungan wilayah kerajaan. Perhelatan *sheba* diselenggarakan bertepatan dengan saat Upacara *Garebeg Maulud* yang bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 1636. Penguasa bawahan diharuskan datang, sebab ada kegiatan yang bersifat khusus. Kehadiran penguasa wilayah juga diberitakan dalam Babad Sangkalaning Momana : "*Para bupati bang wetan sowan ingriku pametangipun Siti tanah Jawi .....*" (Para bupati di Bang Wetan menghadap raja dan melakukan penghitungan luas tanah di Jawa) (Babad Sengkaling Momana dan Babad Sengkala, Koleksi Reksa Pustaka, Mangkunegaran; Raffles, 2008). Pada momen ini, selain dilakukan pengukuran luas tanah di Jawa atau registrasi wilayah kerajaan, juga ditetapkan struktur pemerintahan kerajaan.

*Sebha* menandakan kesediaan pejabat untuk setiap waktu melayani raja. Arti politis *sebha* merupakan kepatuhan masyarakat kepada kekuasaan dan perintah seseorang yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam lingkungan keraton, khususnya bagi pejabat birokrasi, *sheba* merupakan institusi penting dalam hubungan yang sangat formal antara atasan dan bawahan, khususnya dalam hubungannya dengan Raja. Oleh karena acara *sheba* dilakukan pada hari Senin dan Kamis (mingguan), kemudian lebih dikenal dengan istilah *Senenan* dan *Kemisan* (Moertono, 1985:114 dan de Graaf, 1987:125).

Selain itu, *sheba* atau *pisowan* mempunyai fungsi khusus, yaitu peningkatan kebesaran raja. Pada upacara-upacara khusus, seperti *Garebeg*, semua pejabat dari seluruh bagian negara harus datang. Bagi para pejabat, termasuk daerah bawahan, ikut serta dalam upacara *Garebeg*

merupakan kehormatan. Terutama karena pengaturan tempat duduk yang benar-benar menurut jenjang kepangkatan, beda warna dan corak pakaian serta perlengkapannya, ditambah jumlah pengiring jelas menunjukkan kedudukan pejabat itu dalam jenjang birokrasi (Margana, 2004: 81-97, 307-312, 347-356).

Bila pejabat ingin menyatakan rasa tidak puas, dendam, dan benci kepada raja, ia sengaja menghindari datang ke *pisowan* atau tidak *sebha*. Contohnya, ketika Senopati, pendiri Mataram memutuskan untuk membentuk kerajaannya sendiri. Maksudnya itu diperlihatkan dengan tidak hadir pada hari *sebha/pisowan* di Kerajaan Pajang (Ras, 1987:70-72). Akan tetapi, bila raja memberikan hak tidak hadir selama kurun waktu tertentu, maka ketidakhadirannya itu bisa sebagai kemurahan hati raja. Contohnya, Bupati Priangan, ketika dilantik oleh Sultan Agung, diijinkan tidak hadir di Mataram selama "*pitung pa-jeneng-an*" (tujuh tahun) atas jasa-jasanya menindas pemberontakan Adipati Ukur pada tahun 1630 (Moertono, 1985:115). Contoh lain, Senopati, setelah dilantik menjadi pengganti ayahnya (Ki Ageng Pamenahan) sebagai bawahan Pajang diijinkan tidak hadir di kraton selama satu tahun (Ras, 1987:70).

Institusi *sebha*, pada masa Mataram juga menjadi *instrumen* efektif untuk mengontrol kesetiaan seluruh wilayah kerajaan. Misalnya: Adipati Pragola sebelum melakukan perlawanan terhadap Sultan Agung (1627) sebagai tanda pembelotannya beberapa kali tidak hadir di istana saat upacara *sheba Garebeg Maulud*. Tindakan sama juga dilakukan Tawang Alun, penguasa Blambangan, tatkala mulai melakukan pembangkangan terhadap Mataram (Lekkerkerker, 1913, dan Pigeaud, 1932). Pada masa Pakubuwana II (1726-1749) penguasa Madura: Cakraningrat IV beberapa kali tidak hadir (1729, 1732) pada perayaan *Garebeg* di Kartasura. Tindakan itu merupakan petunjuk terhadap pembelotannya. Meskipun waktu itu Cakraningrat IV mengirimkan puteranya: R. Tumenggung Suradiningrat, namun

tindakan tersebut telah menyulut amarah dan kegeraman Sunan (Remmelink, 1990, 264).

Selain *sheba*, dalam usaha menjamin stabilitas kekuasaannya, raja memiliki cara untuk memata-matai sikap dan gerakan penguasa bawahannya dan rakyatnya. Untuk keperluan itu raja memasang telinga di segala penjuru kerajaan melalui tetua atau pejabat birokrasi. Jika ada gerakan yang dianggap berbahaya, maka raja dapat mengkategorikannya sebagai gerakan oposisi. Dengan cara tersebut raja dapat mengetahui pelbagai gerak atau gejolak yang terjadi dalam masyarakat. Para pejabat atau penguasa yang melewati batas wewenangnya akan dipecat oleh raja atau dipindahkan ke lokasi lain (Kasdi, 2003:23-24).

Kewajiban lain daerah terhadap pusat selain *sheba* adalah pengiriman upeti, penyerahan hasil pajak, dan pengiriman tenaga kerja. Upeti dalam pengertian umum dimaksudkan sebagai pemberian oleh seseorang terhadap raja. Pemberian atau upeti dapat berupa sesuatu yang mengingatkan, yaitu kewajiban memberi sesuatu terhadap raja atas dasar kesetiaan, karena yang bersangkutan ada dalam perlindungan raja. Upeti tidak hanya berupa barang tidak bergerak, akan tetapi kadang-kadang dapat juga berupa wanita cantik, hewan yang sangat jarang ditemukan di suatu tempat, atau sejenis tumbuh-tumbuhan langka (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984:324). Sementara pajak diartikan sebagai kewajiban menyerahkan barang atau uang (dalam jumlah yang ditentukan) pada waktu tertentu (setahun atau setelah panen) kepada pemerintah pusat. Dengan upeti dan pajak ini, secara tidak langsung kerajaan yang menjadi pelindung bagi daerah-daerah akan menjadi bertambah kaya dan kekayaan itu akan jatuh ke tangan raja. Selain menyerahkan upeti dan menyerahkan berbagai macam pajak, daerah-daerah yang menjadi bagian dari satu pusat kerajaan juga berkewajiban mengirimkan tenaga manusia untuk membangun, keperluan perang, menyediakan logistik untuk ekspansi ke wilayah

lain, dan tenaga-tenaga bagi keperluan upacara-upacara kerajaan (Margana, 2004).

## PENUTUP

Dengan tegaknya kolonialisme di Jawa, loyalitas penguasa daerah mengalami perubahan bentuk. Para bawahan raja kini menjadi abdi negara Kolonial Belanda. Kesiapan mengabdikan dan keberanian sebagai citra penguasa terdesak oleh rasa kewajiban, ketaatan dan kesediaan berkorban kepada penguasa kolonial. Pada masa penjajahan Jepang khasanah pewayangan dihidupkan lagi melalui organisasi Peta. Nilai-nilai yang terdapat pada lakon-lakon wayang dipakai sebagai landasan mental bagi anggota Peta. Hal ini sangat sesuai dengan suasana keprajuritan. Ketika kemerdekaan benar-benar tercapai, gambaran diri sebagai ksatria semakin berkembang. Terutama karena negara merdeka yang baru terbentuk mendapat ancaman oleh kekuatan-kekuatan yang hendak menghancurkannya. Terkait dengan situasi revolusi, diyakini bahwa hanya pemimpin yang membaktikan diri sebagai pejuang demi kemajuan bangsa dan rakyatnya, serta membaktikan pada kebenaran, akan dapat bertahan dalam krisis dan memiliki kedudukan terhormat.

Lantas bagaimana dengan *sebha* pada masa sekarang? Pada waktu sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, baik di kalangan birokrat dan akademisi, sering terdengar ungkapan "setor muka". Istilah ini menunjuk pada upaya hadir dalam suatu momen tertentu dan ada kecenderungannya hanya sekedar formalitas semata. Tentu ada kepentingan tertentu di balik realitas tersebut, namun dalam perspektif historis, fenomena demikian sejatinya sudah ada sejak dulu. Dilihat dari perspektif kekuasaan, *sebha* memiliki dua dimensi. Dimensi pemilik kekuasaan dan yang dikuasai. Keduanya memiliki kepentingan yang relatif sama, memanfaatkan *sebha* untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan, *sebha* mengalami perubahan

bentuk, tetapi substansinya tetap, sebagai sebuah mekanisme untuk melestarikan kekuasaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. R. O'G. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt (Ed), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Kuasa-Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Babad Sengkalaning Momana*, dan *Babad Sangkala Koleksi Reksapustaka Mangkunegaran*, Surakarta.
- Brinton, P. 1996. *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, Perspektif Tradisi-tradisi Jawa dan Barat*. Jakarta: LP3ES
- Budiardjo, M. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- de Graaf, H.J. 1987. *Puncak Kekuasaan Mataram : Politik Ekspansi Sultan Agung* Jakarta : Grafiti Pers
- Fasseur, C. 1987. "Tentang Lebak", dalam T. Ibrahim Alfian, dkk. (Ed.), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjowirogo, M. 1984. *Manusia Jawa*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Kartodirdjo, S., Sudewo, A., Hatmosuprobo, S., 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kasdi, A. 2003. *Perlawanan Penguasa Madura atas Hegemoni Jawa, Relasi Pusat-Daerah Pada Periode Akhir Mataram (1726-1745)*. Yogyakarta: Jendela.
- Kayam, U. 1992. *Para Priyayi, Sebuah Novel*. Jakarta; Pustaka Utama Graffiti.
- Lekkerkerker, C. 1913. "Blambangan", dalam *Indische Gids II/1913*.
- Margana, S. 2004. *Pujangga Jawa dan Bayang-bayang Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_. 2004. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moedjanto, G. 1994. *Konsep kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius
- Moertono, S. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Palmier, L.H. 1960. *Social Status and Power in Java*. London: University of London.
- Pigeaud, Th. G. Th. 1932 "Aanteekeningen betreffende den Javaanschen Oosthoek" dalam *Tijdschrift Bataviaasch Genootschap LXXII*,
- Poesponegoro, M.D. dan Nugroho Notokusanto (Ed). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia III, Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwadi. 2004. *Falsafah Militer Jawa*. Yogyakarta: Sadasiva.
- Raffles, T.S. 2008. *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Ras, J.J. 1987. *Babad Tanah Djawi de Prozaversie van Ng. Kertapradja*. Dordrecht - Holland/ Providence-USA: Fooris Publications
- Rommelink, W.G.J. , 1990. *Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and The Chinese War*. Leiden : Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden
- Schrieke, B.J.O., 1974. *Penguasa-penguasa Pribumi*. Jakarta: Bhratara.



- Serat Pustaka Rajapuwara*, Koleksi Reksapustaka  
Mangkunegaran, Surakarta, No. MS  
113.
- Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan..
- Tim Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur. 2005. *Penelitian Penelusuran dan Penetapan Harijadi Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Biro Pemerintahan Daerah TK I Propinsi Jawa Timur, .
- van Miert, H. 2003. *Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, KITLV.
- Zoetmulder, P.J. 1983. *Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Djambatan.

---

<sup>1</sup>Artikel pernah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Sistem Politik Jawa dalam Perspektif Historis” di Aula A3 Lantai 2 Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang pada tanggal 2 November 2015